

Analisis Hubungan Bilateral Indonesia-Amerika Serikat: Studi Kebijakan Imigran pada Masa Pemerintahan Donald Trump (2017-2021)

Khaeruddin

^a, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

¹ khaeruddin@unm.ac.id

* Corresponding Author; Khaeruddin



Received 15 April 2023; accepted 24 Mei 2023; published 30 Juni 2023

ABSTRACT

This paper discusses the bilateral relationship between Indonesia–United States due to immigration policies during the Donald Trump administration in the period 2017-2021 and the immigrant community in the United States and the relationship between the two. The formulation of the problem is what motivates the United States to decide its immigration policy and second is how Indonesia responds to the United States' policy, especially the problem of immigrants from Indonesia. The immigration policy discussed in this paper is the Executive Order signed by Donald Trump in 2017 regarding the ban on people from seven Muslim countries who, according to the United States, are supporting countries. The writing method uses literature study and data presentation or literature review. This paper shows that Donald Trump's immigration policy has an impact on immigrants from seven existing Muslim countries and prospective immigrants who will go to the United States. The impact on the main target, in terms of bilateral relations with Indonesia, did not show a significant effect, although there was a decrease in the number of students studying in the United States of around 17% due to this policy. However, the Indonesian government considers Donald Trump's policy only to maintain security in the United States. Indonesia and the United States after Donald Trump's Immigration policy The US Ambassador asked the Indonesian government that the policy was not aimed at Muslims but for US security to limit immigrants from Indonesia who would receive protection from the Indonesian Embassy in the United States.

KEYWORDS

Immigration Policy; Bilateral Relations; Indonesia; United States of America.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



1. Pendahuluan

Migrasi secara umum merupakan perpindahan manusia dari suatu tempat ke kawasan lain untuk melanjutkan kehidupannya. (Shallom dkk., 2020). Namun, kedatangan imigran di negara tertentu tidak selalu merupakan hal yang baik, seperti tergambar dari permasalahan yang ditimbulkan oleh kedatangan imigran di negara tersebut. Kasus migrasi juga terjadi di Amerika Serikat yang menjadi tujuan banyak imigran. Memang penting untuk memperhatikan studi keimigrasian, terutama jika menyangkut penduduk suatu negara. Salah satu negara yang paling banyak mendapat sorotan dalam komunitas global terkait dengan kebijakan imigrasi adalah Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu terjadi pada masa kepemimpinan Donald Trump pada 2017-2021.

Donald Trump dari awal masa kampanye pemilihan umum di tahun 2016, ditandai dengan berkembangnya golongan ekstrim putih atau *White Supremacist* semakin membuktikan eksistensinya menjadi pendukung Donald Trump. Jika pada masa kemudian kelompok ini sering menjatuhkan imigran dan kelompok minoritas lainnya menjadi perilaku kriminal, saat ini mereka seolah menerima justifikasi yang berasal sistem pemerintahan Presiden Trump. Artinya tindakan rasisme kulit putih dan kekerasan yang mereka lakukan sudah menjadi bagian kebijakan pemerintahan AS waktu ini (Padmi & Yulianti, 2021).

Kebijakan imigrasi ini diawali dengan slogan Donald Trump, "Make America Great Again" yang sejalan dengan visi dan misi kepemimpinannya. Memperbaiki sistem domestik dan memulihkan hegemoni global Amerika Serikat adalah kunci kampanye Trump untuk menarik pasukan, terutama orang Amerika

konservatif yang baru-baru ini mengkhawatirkan imigrasi dan terorisme. Trump menanggapi langsung informasi tersebut, mengungkapkan posisinya yang kontroversial. Banyak pidato Trump mengandung kekerasan dan rasisme.

Pernyataannya mengenai opini terorisme serta Islam “radikal”, misalnya, direspon negatif oleh kalangan muslim Amerika Serikat serta dunia internasional. Trump cenderung vokal terhadap isu Islam “radikal” dan terorisme, bahkan hingga ia berjanji supaya tidak hanya membatasi, tetapi melarang masuknya imigran dari negara-negara Islam yang dicurigai menjadi akar terorisme (Berman, 2015). Fokus Trump pada kebijakan keamanan nasional adalah memperketat aturan terhadap imigran ilegal dengan program membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko. Menurut Trump, merencanakan kebijakan akan secara drastis mengurangi angka kejahatan di Amerika Serikat, seperti penyelundupan narkoba serta tindak kriminal lainnya, termasuk kekerasan dan pemerkosaan yang disebut bersumber dari meningkatnya jumlah imigran yang masuk melewati perbatasan secara ilegal. Mengingat lapangan pekerjaan selama ini didominasi dari kaum pekerja yang berlatar belakang imigran, maka berdasarkan pendapat Trump bahwa pengetatan sistem imigrasi akan membuat angka pengangguran di Amerika menurun. Rencana kebijakan imigrasi ini menimbulkan polemik, khususnya imigran Hispanik yang menduga Trump menilai mereka menjadi akar permasalahan yang terjadi di Amerika selama ini. (Yuliantoro dkk., 2017).

Tepat pada tanggal 27 Januari 2017, Presiden Donald J. Trump menandatangani *Executive Order* III terkait wacana melindungi bangsa dari serangan teroris asing ke Amerika Serikat. Perintah eksekutif ini bertujuan untuk melindungi warganya dari serangan teroris, termasuk yang dilakukan oleh warga negara asing. Pencegahan terorisme menggunakan pembatasan akses masuk dari hampir semua masyarakat Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman (Trump, *Executive Order Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*, 2017).

Kebijakan tersebut memunculkan beragam reaksi, terutama dari masyarakat di perbatasan negara. Sebagian pihak berpendapat bahwa kebijakan Donald Trump menimbulkan kerugian besar bagi Amerika Serikat, terutama di sektor ekonomi. Hal ini disebabkan oleh memburuknya hubungan bilateral kedua negara (Anggoro dkk., 2018).

Dari fakta-fakta yang menggambarkan latar belakang kebijakan imigrasi Amerika Serikat, menjadi isu politik yang juga mempengaruhi beberapa negara, termasuk Indonesia. Fakta bahwa Amerika Serikat telah menangguk dan melarang perjalanan ke Amerika Serikat dari negara yang hampir didominasi oleh penduduk Muslim. Mempertimbangkan serangkaian masalah ini, muncul pertanyaan tentang apa latar belakang Amerika Serikat memutuskan kebijakan imigrasinya karena alasan lain daripada banyak penelitian sebelumnya.

Pertanyaan lain adalah bagaimana Indonesia akan menanggapi kebijakan AS ini. Pada prinsipnya, meskipun Indonesia bukan negara merdeka, namun perlu diperhatikan karakteristik penduduk Indonesia yang juga mayoritas beragama Islam dilarang masuk ke Amerika Serikat. Hal ini penting untuk diperhatikan sebagai salah satu bentuk kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang mengkaji masalah migrasi dan menilai apakah solusi yang muncul dari kebijakan Donald Trump berpotensi untuk menyelesaikan masalah, atau sebaliknya. Sehingga Indonesia sebagai negara demokrasi tetap menerapkan prinsip-prinsip hubungan eksternal yang bebas dan aktif untuk berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Berangkat dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara kritis mengenai “Analisis Hubungan Bilateral Indonesia-Amerika Serikat: Studi Kasus Kebijakan Imigran pada Masa Pemerintahan Donald Trump (2017-2021).

2. Metode

Penulisan dalam artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur. *Literature review* seperti yang dijelaskan Cooper dalam Creswell (2010) memiliki beberapa tujuan, yaitu menginformasikan pada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian menggunakan literatur yang ada, dan mengisi celah pada penelitian sebelumnya, *literature review* berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka (artikel, buku, slide, informasi dari internet, data gambar dan grafik dan lain lain) tentang topik yang dibahas (Hariyanti & Wirapraja, 2018).

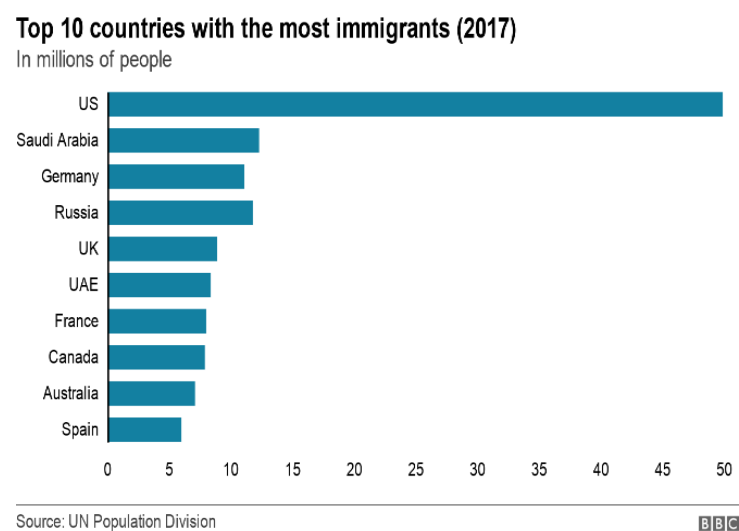
3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Donald Trump dan Kebijakan Imigrasi

Mengutamakan Hubungan Bilateral Pada awal masa jabatan Presiden Donald Trump, setelah pelantikannya pada 20 Januari 2017, beberapa prioritas kebijakan luar negeri AS telah diidentifikasi. Donald Trump membuktikan kekuatannya untuk menjadi Presiden baru dan memproklamasikan posisi Amerika sebagai *America First*, artinya dia akan mengutamakan kepentingan nasionalnya sendiri dan mengubah kebijakan luar negeri Amerika. Dalam rencana lain Donald Trump dibandingkan multilateral mengakibatkan Asia Tenggara menjadi tempat primer investasi luar negeri Amerika Serikat (Babay, 2021).

Donald Trump terpilih dan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2017 dengan motto "*America First*". Kebijakan ekonomi dan politik lebih bersifat inward looking dalam arti ingin menciptakan perekonomian dan kebijakan yang berdampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Membawa kemakmuran bagi rakyat dan melindungi bisnis Amerika dengan mengelola ekonomi domestik dan mengurangi peran perdagangan luar negeri di Amerika Serikat, yang berarti ekonomi membawa manfaat terbesar bagi negara dan rakyat Amerika. biasanya proteksionis. Donald Trump berusaha mengurangi keterlibatan Amerika dalam militer di seluruh dunia, yang cukup mahal dan juga menawarkan peluang pertumbuhan bagi perusahaan di Amerika Serikat daripada perusahaan asing atau produk asing yang menguasai pangsa pasar di Amerika Serikat. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya Amerika Serikat dari organisasi regional yang dulu di inisiasi oleh Amerika Serikat, contohnya pakta Kemitraan Trans Pasifik (*Trans Pacific Partnership*) yang terdiri dari organisasi regional pada bidang ekonomi, perdagangan bagi negara yang terletak di Asia untuk melakukan kerjasama pembangunan ekonomi, perdagangan antar anggota *Trans Pacific Partnership* (Sutrisno & Meirinaldi, 2020).

Bangsa Eropa mempraktikkan sejarah imigrasi di Amerika sejak abad ke-16, kemudian jumlah imigran meningkat dari 20 juta menjadi lebih dari 100 juta orang dari pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20 (Altabaa & Hamawiya, 2019). Amerika Serikat adalah negara dengan imigran terbanyak di dunia. Banyak yang telah dikatakan tentang ledakan imigrasi, tetapi data melukiskan gambaran yang berbeda. Hal ini ditunjukkan dengan data jumlah pendatang sebagai berikut.



Gambar 1. Top 10 countries with the most immigrants (2017).
(BBC, News Indonesia)

Eksistensi imigran memberikan kontribusi pada hal kewirausahaan serta inovasi ke dalam perkembangan ekonomi Amerika Serikat. Berdasarkan *National Foundation for American Policy Study*, dari 87 perusahaan rintisan yang bernilai 1 miliar dollar, terdapat 44 perusahaan yang setidaknya memiliki pendiri yang merupakan imigran (Alamari, 2020). Jika dipandang lebih jauh 44 perusahaan ini bila digabungkan telah mempunyai nilai sebesar 168 miliar dollar atau separuh harga pasar saham Rusia dan Meksiko. Nilai yang sangat besar untuk sebuah kontribusi. Keberadaan imigran ini sangat memberikan

kontribusi terhadap berbagai macam paten yang dirancang, keberadaan imigran sendiri tidak selamanya diisi oleh *low class worker* tetapi juga *high skilled worker* (Alamari, 2020).

Perdebatan kebijakan luar negeri Amerika pada masa kepresidenan Presiden Trump dapat dilihat pada indikator debat ekonomi dan politik. Misalnya, Presiden Trump menyebut kontroversi ekonomi sebagai "America First" dalam pidato pelantikannya di Gedung Putih pada 21 Januari 2017. "America First" adalah gagasan untuk fokus pada kepentingan nasional dan mengabaikan kepentingan asing. Masalah ini bermula pada tindakan proteksionis dalam perdagangan internasional dan pembatasan imigran yang datang ke Amerika. "*From this moment on, it's going to be America First*" (Siswanto, 2018).

Pada Januari 2017, Donald Trump juga menandatangani Executive Order No. 13769, "Melindungi Bangsa dari Serangan Teroris Asing", yang didalamnya termasuk penangguhan (Siregar, 2020). Pedoman penting juga diberlakukan di sektor imigrasi. Trump telah menolak masuk ke wilayah AS ke beberapa negara Muslim, termasuk pengungsi Suriah yang telah tersebar ke berbagai negara untuk mencari perlindungan atau perlindungan (larangan perjalanan).

Kebijakan ini mempunyai kaitan erat melalui perlawanan terhadap terorisme (BBC News, 2017). Dapat dipahami bahwa Trump bertindak lebih langsung untuk melindungi negaranya tanpa menggunakan pihak atau negara mana pun untuk menekan aksi teroris di Amerika Serikat. Kebijakan keimigrasian ini berbeda dengan Presiden Amerika Serikat sebelumnya, Bush dan Barack Obama, dalam artian mereka mengupayakan kerja sama militer yang lebih besar dengan berbagai negara untuk memerangi aksi teroris (*war against terror*). Trump dinilai lebih mementingkan Amerika Serikat secara khusus daripada negara-negara di luar Amerika Serikat (Putri & Rivai, 2019).

Menurut Trump, secara ekonomi kesempatan kerja di Amerika Serikat sudah dipegang oleh kaum imigran, dan masyarakat menjadi target aksi terorisme (Pujayanti, 2017). Meski kebijakan ini sempat memancing reaksi serius di seluruh dunia, namun dipicu oleh pendapat Trump yang membuat pernyataan bahwa pelakunya, termasuk terorisme, adalah imigran dari beberapa negara Timur Tengah. Trump telah membentuk kebijakan imigrasinya dengan melihat masalah mendasar yang dihadapi masyarakat Amerika, khususnya masalah ekonomi dan pengangguran, yang menyebabkan meningkatnya kejahatan. Potensi ancaman inilah yang pada akhirnya membuat Trump mengeluarkan kebijakan yang umumnya "kontroversial" untuk melayani kebutuhan Amerika Serikat. (Pratiwi, 2021).

Oleh karena itu, Indonesia juga menerapkan kebijakan yang menerapkan ketentuan hukum perdata bagi mereka yang masuk ke Amerika Serikat secara ilegal atau melanggar Undang-Undang Keimigrasian dan Kewarganegaraan (INA). bagi mereka yang memasuki negara secara legal tetapi kemudian melanggar peraturan masuk. Kemudian terungkap bahwa selama masa jabatannya, Donald Trump tidak bersimpati pada keluarga atau anak-anak tanpa pendamping yang melintasi perbatasan, bahkan Donald Trump berkali-kali mencoba menangkap imigran sebagai penjahat yang tidak pantas dihormati. (Siregar, 2020).

3.2 Dampak Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat

Kebijakan "*America First*" adalah kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kepentingan nasional suatu negara, termasuk penekanan pada keamanan nasional dan sistem imigrasi AS. Dalam konteks ini, Trump membatasi masuknya imigran dari negara-negara mayoritas Muslim ke Amerika Serikat dan mendirikan tembok perbatasan utama antara Meksiko dan Amerika Serikat untuk mengamankan wilayah Amerika. Kebijakan imigrasi Trump mengacu pada tiga kebijakan dan indikator yang sesuai, yaitu: Nasionalisme, anti-imigran dan anti-Muslim. Kebijakan imigrasi merupakan salah satu janji kampanye Trump tahun 2016, berdasarkan tingginya tingkat kriminalitas para imigran, terutama imigran gelap. Trump membenarkan pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa kejahatan berat seperti pembunuhan, pencurian dan kejahatan lainnya dilakukan oleh imigran yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Hal ini melemahkan Amerika Serikat baik secara ekonomi maupun dari segi keamanan (Fadil & Susiatiningsih, 2020).

Pada Januari 2017, perintah eksekutif Trump ditandatangani, mengakhiri operasi "tangkap dan lepaskan". Kemudian, pada April 2017, Departemen Kehakiman AS mengimplementasikannya dengan mengeluarkan memorandum eksekutif untuk memperkuat dua kebijakan keamanan perbatasan dan penegakan tanah air. Memo tersebut menekankan bahwa jaksa federal didorong untuk memberikan

prioritas yang lebih tinggi untuk menuntut kejahatan imigrasi seperti masuk secara ilegal dan penyelundupan (Pierce 2018). Berdasarkan data dari New York Center for Migration Studies (2017), pada era Obama jumlah pengungsi meningkat dari 85.000 pada tahun 2016 menjadi 110.000 pada tahun 2017. Di era Presiden Trump saat ini, langkah administratif kemudian mengurangi jumlahnya. dari para pengungsi. Langkah administratif untuk menjaga keutuhan keamanan nasional menyelamatkan hingga 6.000 jiwa pada 2017 dan menyambut sedikitnya 53.716 pengungsi tahun ini. Pada 2018, Trump mengurangi jumlahnya menjadi 45.000 pengungsi. Oleh karena itu, jumlah pengungsi di Amerika Serikat diperkirakan semakin menurun, mencapai level terendah sejak tahun 1980 (Selee 2017). Di bidang urusan dalam negeri, Kongres dan eksekutif harus bertindak untuk meningkatkan hukuman atas berbagai kejahatan imigrasi.

Aturan imigrasi Trump memaksa DHS untuk menunjuk yurisdiksi tertentu sebagai pengadilan suaka. Selain itu, Trump juga memberi wewenang kepada lembaga penegak hukum negara bagian untuk bertindak sebagai petugas imigrasi. Tujuan mereka adalah untuk menangkap atau menahan imigran. Trump juga mengakhiri Program Penegakan Prioritas (PEP) yang didirikan di bawah pemerintahan Obama dan melanjutkan rencana yurisdiksi lokal untuk menahan imigran ilegal saat mereka berada dalam tahanan. (Pusat Studi Migrasi 2017). Arahan tersebut juga menekankan perluasan daftar prioritas orang asing yang akan dideportasi untuk memasukkan setiap pelanggaran atau tindak pidana, seperti: B. Orang yang dituduh melakukan penyalahgunaan prosedur, penipuan atau kesalahpahaman yang disengaja, serta semua hal yang berkaitan dengan kegiatan yang merugikan masyarakat (imigrasi). Tengah). Studi 2017).

Selain mengakhiri PEP, pemerintahan Trump juga mengakhiri program Deferred Action for Child Arrival (DACA) dan Deferred Action for Parents and Legal Permanents of the United States (DAPA) sebagai bagian dari rencana Dream Act. Program DACA sendiri diluncurkan pada tahun 2012 pada masa pemerintahan Obama sebagai bentuk perlindungan pengungsi. Program ini melindungi 690.000 imigran tidak berdokumen yang memasuki Amerika Serikat dari deportasi dan mengklasifikasikan mereka sebagai anak-anak (Pierce 2018). Pada 5 September 2017, pemerintahan Trump secara resmi mengumumkan pembatalan rencana DACA untuk menghentikan pencari suaka (Rizky & Supriyadi, 2021).

Selain itu, kebijakan yang sangat penting itu mendapat keuntungan dan kerugian baik dari warga negara Amerika Serikat maupun pendapat masyarakat dunia. Politisi pro-Trump percaya mereka diuntungkan karena Trump dipandang mampu menjalankan dan mengelola ekonomi serta menyelamatkan Amerika dari kebangkrutan. Selain itu, Trump dinilai mampu menjaga keamanan Amerika dari serangan teroris oleh "Islam radikal". Sementara itu, menurut orang-orang dari Contra, kebijakan Trump dipandang tidak sesuai dengan prinsip nilai-nilai demokrasi dan kebebasan di Amerika Serikat.

Beberapa tindakan Trump dianggap diskriminatif dan tidak toleran terhadap imigran di Amerika Serikat. Banyak dari mereka mengorganisir aksi protes di wilayah Amerika untuk memperjuangkan keadilan (Pratiwi, 2021). Meski kebijakan ini sempat menimbulkan reaksi besar di dunia internasional, namun karena Trump menyatakan bahwa para imigran dari beberapa negara Timur Tengah melakukan kejahatan, termasuk terorisme.

Dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negerinya didasarkan pada rakyat, tetapi hanya rakyat Amerika Serikat. Ini juga terkait dengan penekanan pada saling ketergantungan, sementara kebijakan Donald Trump justru memprovokasi hubungan buruk dengan Meksiko, seperti: Imigran, sikap anti-Meksiko dari pemerintahan Trump dan juga karena beberapa kebijakannya dipandang merugikan satu pihak. Namun, kebijakan Donald Trump konsisten dengan penekanan bahwa lebih aman melakukan ini sebelumnya, misalnya melalui toleransi nol dan membangun tembok untuk mencegah peningkatan pengungsi imigran ilegal dari Meksiko masuk melalui perbatasan AS-Meksiko.

3.3 Kebijakan Imigrasi Indonesia dan Hubungan Bilateral Indonesia-Amerika Serikat

Banyak orang asing yang berkunjung ke Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) Menurut Departemen Imigrasi, menurut data lalu lintas, Departemen Imigrasi melayani 19.089.288 lintas batas pada Januari-Juni 2017 (Tribun News, 2017). Dibandingkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tentang perkembangan pariwisata nasional Januari hingga November 2018, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mencapai 14,39 juta

orang, meningkat 11,63% dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau tahun sebelumnya, yaitu sekitar 12,89 juta (Detik Finance, 2019).

Saat ini, Indonesia tidak berbeda dengan negara tujuan para imigran mencari nafkah. Bedanya, Indonesia biasanya menjadi negara transit bagi mereka. Indonesia, yang berbatasan langsung dengan wilayah Australia, merupakan wilayah terdekat yang dapat diakses dengan Australia. Imigran Indonesia sebagian besar korban perang, pengungsi dan pencari suaka dari Somalia, Afghanistan, Sudan dan Myanmar. Banyak dari mereka diselamatkan dari perairan terbuka atau sengaja diterbangkan ke Indonesia. Menurut data UNHCR, terdapat 6.191 pencari suaka dan 8.279 pengungsi di UNHCR Jakarta pada akhir Maret 2017.

Tugas keimigrasian ditangani oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait. Kebijakan keimigrasian Indonesia yang selektif terhadap orang asing dirinci dalam Undang-Undang Keimigrasian Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2011. Menurut undang-undang, setiap orang asing yang masuk ke Indonesia dan memperoleh izin tinggal harus didasarkan pada maksud dan tujuan tinggal di Indonesia, dengan menghormati nilai-nilai dan hak asasi manusia. Kemudian, kebijakan keimigrasian Indonesia yang selektif menyatakan bahwa hanya orang asing yang memberikan pelayanan dan tidak menimbulkan ancaman keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah negara Republik Indonesia (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). Penerapan kebijakan selektif merupakan salah satu kepentingan nasional negara Indonesia di bidang keimigrasian untuk melindungi kedaulatan negara Indonesia terhadap ancaman yang dihadapi oleh orang asing yang masuk ke negaranya.

Jika kita melihat kebijakan keimigrasian selektif (*selective policy*) Indonesia, ada dua unsur penting, yaitu pendekatan keamanan dan kesejahteraan, yang dapat dipenuhi atau tidak dilanggar dengan masuknya orang asing ke wilayah Indonesia. Dalam praktiknya, keseimbangan antara kedua pendekatan ini harus diperhatikan, karena satu pendekatan sama pentingnya dengan pendekatan lainnya.

Kedua pendekatan ini berjalan beriringan dalam menyeleksi semua orang asing yang masuk ke Indonesia. Pendekatan keamanan dalam kebijakan ini tidak hanya terkait dengan pendekatan keamanan tradisional, yaitu tentang keamanan negara terkait dengan militerisasi dan konflik yang merupakan bagian dari kedaulatan negara, tetapi juga tentang keamanan non-tradisional, yaitu keamanan manusia warga negara Indonesia. Pengertian pendekatan kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan dimensi material yaitu bahwa kedatangan orang asing dapat memberikan pengaruh positif bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Namun kesejahteraan di sini memiliki arti yang lebih luas dari segi dimensi sosial dan psikologis, yaitu kemampuan memberi dan menerima, dihargai dan dihormati, berpartisipasi dalam pekerjaan yang bermanfaat, serta rasa memiliki dan kepercayaan terhadap masyarakat.

Singkatnya, bagaimana orang asing dapat berpartisipasi secara bermakna dan positif dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kebijakan keimigrasian Indonesia yang selektif berlaku bagi semua orang asing yang masuk ke wilayah negara Indonesia tanpa terkecuali. Pelaksanaan kebijakan ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak semua orang asing dari negara maju atau negara dengan keamanan yang stabil dapat menguntungkan negara Indonesia. Namun sebaliknya: semua orang asing dari negara miskin atau rentan tidak akan menjadi korban jiwa ketika memasuki wilayah Indonesia. Pemilihan orang asing sangat penting untuk menghindari dampak negatif kedatangan mereka di wilayah negara Indonesia.

Dalam konteks kebijakan luar negeri, kepemimpinan Donald Trump berpengaruh terhadap hubungan Amerika Serikat dan Indonesia. Kebijakan Trump lebih menekankan penguatan industri dalam negeri. Implementasi kebijakan Donald Trump dapat diukur dari jumlah imigran Indonesia di Amerika Serikat. Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC melaporkan bahwa pada tahun ajaran 2018/2019 sedikitnya 8.356 mahasiswa di Amerika Serikat belajar di program sarjana, pascasarjana, dan doktoral atau program non-gelar, atau bahkan mengikuti program magang praktek opsional. (Päivittäin, 2020). Menurut sebuah studi oleh Institut Pendidikan Internasional, jumlah siswa meningkat menjadi 900.000 pada 2016-2017, tetapi jumlah siswa internasional menurun sebesar 3%, mencapai 7% pada 2017-2018. Hal yang sama berlaku untuk visa. Jumlah visa pelajar dari luar negeri menurun 17% pada 2016-2017. Penurunan itu karena adanya pembatasan visa pelajar asing dan undang-undang Trump untuk mengurangi jumlah

imigran yang mendorong pelajar untuk merelakan studinya di sana (USA). Kebijakan ini sangat mempengaruhi bagaimana Amerika Serikat menangani kepentingan bisnisnya dengan negara-negara di seluruh dunia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Indonesia akan diuntungkan dengan kebijakan Donald Trump yang melarang masuknya warga negara dari tujuh negara Muslim. Menurutnya, warga tersebut bisa datang ke Indonesia sebagai turis. Menurut Bud, larangan bepergian bagi warga tujuh negara Muslim tidak akan mempengaruhi hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat. (Liputan6.com, 2017).

Di sisi lain, Indonesia mengimpor produk pertanian senilai 1,78 miliar dolar AS pada 2016, naik 31,63 persen year-on-year dari 1,35 miliar dolar AS pada 2015. Disusul makanan dan produk terkait senilai 773,59 miliar dolar. Pada 2016, naik 5,32 persen year-on-year dari US\$734,51 miliar pada 2015. Shinta Kamdani atau Presiden Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Hubungan Internasional dan Investasi menyatakan, perusahaan lokal mewaspadaai ratusan barang seperti kapas, kayu lapis, dll. produk pertanian, saat ini sedang ditinjau di AS berdasarkan GSP AS. Indonesia diperkirakan akan kehilangan surplus perdagangannya jika AS mengakhiri GSP dengan Indonesia. Hal ini karena produk Indonesia dikenakan tarif yang lebih tinggi (The Straits Times, 2018). Selain mengevaluasi kelayakan GSP Indonesia, Amerika Serikat juga mengevaluasi 124 produk asal Indonesia, antara lain tekstil, hasil hutan, kapas, serta berbagai produk pertanian dan perikanan seperti udang dan kepiting. (Pusat Buletin Anggaran Nasional Kajian Anggaran Biro Fakultas DPR RI, 2018).

Pemerintah Indonesia terus melakukan diplomasi dan negosiasi dengan US Trade Representative/USTR untuk mengkaji ulang pengaturan GSP yang diberikan AS kepada Indonesia. Upaya Indonesia dalam menanggapi review pengaturan GSP untuk Indonesia oleh Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump antara lain dengan menyampaikan Pernyataan Menanggapi Review Produk Ekspor Indonesia, atau Review Produk, yang biasanya dilakukan setiap tahun. Pernyataan ini merupakan surat yang berisi informasi untuk mempertahankan produk ekspor yang dikuasai dan termasuk subsidi dari importir produk ekspor Indonesia yang dikuasai. (Yovana & Adina, 2021).

Indikator pertama adalah komunikasi. Baviera menjelaskan, salah satu bentuk implementasi CBM adalah adanya lembaga komunikasi dalam hubungan bilateral, dan hal ini tercermin dari terbentuknya dialog bilateral secara reguler antar negara. Beberapa dialog telah dibentuk dalam diplomasi pertahanan Indonesia-Amerika Serikat, antara lain Indonesia-United States Security Dialogue (IUSSD) dan Bilateral Defense Discussion Amerika Serikat-Indonesia (USIBDD). IUSSD merupakan forum bagi Indonesia dan Amerika Serikat untuk bertukar informasi dan membahas masalah keamanan global, regional, dan nasional yang menjadi kepentingan bersama.

Belum ada pembahasan khusus tentang tinjauan HAM dalam lima tahun terakhir, namun Indonesia terus menunjukkan perkembangan demokrasinya yang patut diapresiasi oleh Amerika Serikat. Forum lain yang dibentuk adalah USIBDD, sebuah forum dialog bilateral yang terorganisir dan terukur antara militer Indonesia dan militer AS. Agenda ini mencakup dialog strategis dan kerja sama di tingkat operasional hingga perencanaan dan pelaksanaan pelatihan, latihan, dan kegiatan pertukaran materi terkait. Indikator lainnya adalah transparansi, yang dicapai dengan mengungkapkan informasi tentang sikap, kemampuan, dan kebijakan nasional negara-negara di bidang militer dan bidang terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi kecurigaan dan kesalahpahaman dari negara-negara yang bersangkutan.

Keterbukaan antara Indonesia dan Amerika Serikat ditunjukkan dengan keluarnya buku putih pertahanan negara. Selain itu, keduanya bekerja sama melalui pelatihan. 6.077 orang belajar di Amerika Serikat dan 142 orang dari Amerika Serikat belajar di Indonesia. Kegiatan transparansi juga dilakukan melalui pertukaran informasi intelijen yang tercantum dalam GSOMIA (*General Security of Military Information Agreement*). Konsultasi tersebut merupakan indikator ketiga dalam implementasi CBM dalam diplomasi pertahanan. Baviera menjelaskan, bentuk negosiasi implementasi CBM dalam hubungan bilateral antar negara akan disampaikan oleh joint commission. Dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat, badan penasehat yang dibentuk oleh kedua negara adalah Joint Commission Meeting (JCM), yang berlangsung untuk memperkuat kemitraan komprehensif bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat dan meningkatkan kontribusi kedua negara sebagai bagian dari perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan ini. Forum JCM dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain Kelompok Kerja

Demokrasi dan Masyarakat Sipil, Keamanan, Perdagangan dan Investasi, Energi, Pendidikan, Iklim dan Lingkungan.

Indikator kelima adalah CBM keuangan. Di era Trump, ekonomi CBM Indonesia dan Amerika Serikat tidak berkembang dengan baik, terbukti dengan masuknya Indonesia dalam daftar negara penyebab defisit AS. Karena itu, Trump mencari cara untuk meningkatkan ekonomi domestiknya. Pengamat politik CSIS Phillips J. Vermonte berpendapat bahwa dari perspektif kebijakan ekonomi, Trump mengejar kebijakan yang akan membuat harga barang yang diimpor atau dibawa ke Amerika Serikat lebih tinggi dari sebelumnya. Dan Indonesia harus memperhatikan hal ini, karena dapat mempengaruhi pertahanan negara dalam bidang ekonomi.

Hal ini dapat mempengaruhi perekonomian negara jika Presiden Trump mengambil langkah-langkah untuk melindungi perekonomian negaranya yang mempengaruhi nilai atau volume ekspor Indonesia. Indikator keenam dalam penerapan CBM bersifat sosial budaya. Dalam indikator ini, hubungan bilateral menunjukkan hubungan interpersonal antara dua negara. Administrasi Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang warga dari tujuh negara Muslim memasuki Amerika Serikat. Meski Indonesia tidak termasuk dalam tujuh negara tersebut, namun perlu mendapat perhatian khusus. Akan sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia jika AS menyamakan Islam Indonesia dengan Islam Timur Tengah, karena dianggap sebagai ancaman.

Oleh karena itu, Indonesia mengadakan pertemuan dengan tokoh agama di Amerika Serikat untuk memberikan pemahaman tentang Islam di Indonesia dan bagaimana Indonesia menyikapi toleransi beragama dan bagaimana Indonesia menyelesaikan masalah agama. Pemerintah AS harus mengetahui bahwa pertemuan para pemuka agama ini dihadiri oleh berbagai agama antara lain Kristen, Protestan, Hindu, Budha dan Islam untuk membahas berita. CBM sosial budaya ini harus diperbaiki dengan mengadakan pertemuan rutin para pemuka agama yang berdampak pada perkembangan CBM, dan kecurigaan Amerika bisa dikurangi. Indikator ketujuh adalah CBM politik. Peristiwa pemilihan gubernur DKI di Jakarta pada awal tahun 2017 memunculkan interpretasi negara-negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Pemilu dimaksudkan sebagai ujian toleransi beragama dan etnis di Indonesia. Ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang garis keras kelompok Muslim di seluruh dunia. Saya masih mencoba menggunakan agama sebagai senjata politik. Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia melanjutkan dan menyatakan dalam setiap kesempatan bahwa demokrasi di Indonesia bergerak ke arah yang sama dan bahwa melalui acara-acara atau forum-forum diskusi yang mereka bentuk telah terjalin hubungan antara pejabat kedua negara (Anwar dkk., 2018).

3.4 Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat pasca kebijakan Imigrasi Donald Trump

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan di Jakarta, meyakinkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia tidak ditujukan kepada umat Islam, melainkan keamanan Amerika Serikat yang berakar pada terorisme. Presiden Indonesia Joko Widodo menilai kebijakan keimigrasian Presiden Trump tidak akan berdampak signifikan bagi WNI. Namun, melalui Menlu Retno Marsud, pemerintah Indonesia menyampaikan penyesalan yang mendalam atas kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat. Dia menekankan bahwa satu-satunya cara untuk memerangi terorisme adalah melalui kerja sama internasional.

Menggabungkan radikalisme dan terorisme dengan bantuan keyakinan tertentu melanggar norma hubungan internasional yang beradab dan saling menghormati. Strategi Trump dapat merusak kerja sama global melalui perang melawan teror karena AS dapat dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara Muslim moderat. Wakil Presiden Yusuf Kalla percaya bahwa kebijakan Trump meningkatkan ketidakpercayaan di dunia Muslim. Hal ini juga berdampak tidak langsung bagi Indonesia karena dapat mengalihkan arus imigran ke Asia. Indonesia merupakan negara transit bagi para imigran ke Australia.

Indonesia terbuka untuk pengungsi, meski bukan negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 yang Mengatur Peraturan Pengungsi Internasional. Jumlah pengungsi dan pencari suaka Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 14.000 orang. Indonesia tidak berencana menawarkan travel atau *travel advisories* ke Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri mengimbau warga negara Indonesia di Amerika Serikat untuk tetap menghormati hukum dan ikut menjaga ketertiban. Kementerian Luar Negeri terus memantau

perkembangan dan mengantisipasi konsekuensi yang mungkin terjadi bagi WNI dan mendesak seluruh perwakilan RI di Amerika Serikat untuk mengaktifkan layanan 24 jam tersebut.

Melindungi warga negara Indonesia merupakan prioritas Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat. Jumlah WNI di Amerika Serikat saat ini kurang lebih 120.000 hingga 400.000 orang, status imigran gelap diperkirakan kurang lebih 40.000. Dari segi ekonomi, perkembangan Amerika Serikat tidak bisa diabaikan untuk negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan data BPS, Amerika Serikat menjadi tujuan ekspor utama Indonesia pada tahun 2016 dengan nilai \$15,098 miliar. Impor Indonesia dari Amerika Serikat sebesar \$7,202 miliar pada tahun 2016 (Pujayanti, 2009). Investor di pasar keuangan tampak khawatir dengan kebijakan kontroversial ini. Kebijakan Presiden Trump telah menyebabkan dolar AS melemah terhadap mata uang utama lainnya, memicu kekhawatiran pasar tentang kebijakan imigrasi Trump. Hal ini sedikit banyak dapat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.

4. Kesimpulan

Donald Trump terpilih dan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2017 dengan motto "*America First*". Kebijakan ekonomi dan politik lebih bersifat inward looking dalam arti ingin membangun perekonomian dan kebijakan yang akan terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang akan membawa kemakmuran bagi rakyat dan melindungi perusahaan-perusahaan Amerika di negara tersebut. Menarik/menguasai dan mengurangi peran bisnis asing di Amerika Serikat berarti bisnis tersebut akan membawa keuntungan sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat Amerika yang cenderung proteksionis.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia tetap menunjukkan dan mengungkapkan dalam setiap kesempatan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan searah, dan melalui forum-forum dialog yang telah mereka jalin, terjalin hubungan antara pejabat kedua negara. (Anwar dkk., 2018) D. Hubungan Indonesia-AS Setelah kebijakan keimigrasian Donald Trump, Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan di Jakarta meyakinkan pemerintah Indonesia bahwa kebijakan tersebut tidak ditujukan kepada umat Islam tetapi keamanan AS terhadap terorisme.

References

- Alamari, M. F. (2020). Imigran Dan Masalah Integrasi Sosial. *Jurnal Dinamika Global*, 5(02), 254–277. <https://doi.org/10.36859/jdg.v5i02.237>.
- Altabaa, H., & Hamawiya, A. (2019). *Émigré Creativity in a Historical Context*. *Society*, 7(2), 59–70. <https://doi.org/10.33019/society.v7i2.85>.
- Anggoro, A. D., Purwati, E., & Hilman, Y. A. (2018). Donald Trump dan Berita Imigran di *Aljazeera.com* dan *Foxnews.com*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(2), 233–246. <https://doi.org/10.24002/jik.v15i2.1201>.
- Anwar, S., Lasmono, L., & Nuzulia, F. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Meningkatkan Kerjasama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat (2012-2017). *Strategi Perang Semesta*, 4(1), Article 1. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPS/article/view/232>.
- Babay, L. R. (2021). Politik Luar Negeri Amerika Serikat Di Asia Tenggara Selama Pemerintahan Presiden Donald Trump. *Jurnal Politico*, 10(4), Article 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/37737>.
- Daily, N. I. (2020). *Indonesia di Urutan ke-19 Jumlah Mahasiswa Asing di AS*. Daily News Indonesia. Retrieved, April 9, 2022, from Daily News Website: <https://www.dailynewsindonesia.com/news/mancanegara/indonesia-di-urutan-ke-19-jumlah-mahasiswa-asing-di-as/>.
- Fadil, I., & Susiatiningsih, R. H. (2020). Analisis Karakteristik Personal Donald Trump Dalam Kebijakan Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States. *Journal of International Relations*, 6(2), 257–266. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/27207>.

- Hariyanti, N. T., & Wirapraja, A. (2018). Pengaruh Influencer Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Moderen (Sebuah Studi Literatur). *Eksekutif*, 15(1), 133–146. <https://jurnal.ibmt.ac.id/index.php/jeksekutif/article/view/172>.
- Liputan6.com. (2017). *Top 3: Dampak Kebijakan Imigrasi Trump bagi Indonesia*. Retrieved April 8, 2022, from liputan6.com. Website: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2840870/top-3-dampak-kebijakan-imigrasi-trump-bagi-indonesia>.
- Okezone. (2018). Jumlah Mahasiswa Asing di Amerika Mendadak Turun, Apa Penyebabnya? : *Okezone Edukasi*. Retrieved April 7, 2022 from Okezone. Website: <https://edukasi.okezone.com/>. <https://edukasi.okezone.com/read/2018/10/24/65/1968324/jumlah-mahasiswa-asing-di-amerika-mendadak-turun-apa-penyebabnya>
- Padmi, M. F., & Yulianti, Z. (2021). Kebijakan Imigrasi Presiden Trump Terhadap Masyarakat Imigran Di Amerika Serikat Tahun 2017–2018. *Global Insight Journal*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.52447/gij.v6i2.4763>.
- Pratiwi, S. A. (2021). American First: Kebijakan Donald Trump Dalam Pembatasan Kaum Imigran Ke Amerika Serikat. *Journal of International Studies*, 6(1), 21.
- Pujayanti, A. (2009). Kebijakan Imigrasi Pemerintahan Presiden Donald Trump. 2017, IX, 4.
- Putri, H. E., & Rivai, A. N. A. (2019). Donald Trump, America First, dan Deglobalisasi: Bagaimana Kelanjutannya? *Insignia: Journal of International Relations*, 6(1), 30–49. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2019.6.1.1318>.
- Rizky, L., & Supriyadi, H. S. K. B. (2021). Dampak Masuknya Imigran Timur Tengah terhadap Keamanan Manusia Domestik dan Respon Kebijakan Amerika Serikat Era Donald Trump. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 4(2), 15–28. <https://doi.org/10.36341/jdp.v4i2.1944>.
- Shallom, G. L., Supriyadhie, K., & Setiyono, J. (2020). Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat Mengenai Pemisahan Anak Imigran Ilegal Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Diponegoro Law Journal*, 9(1), 102–117. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/26473>.
- Siregar, S. P. N. (2020). Pergeseran Kebijakan Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama Dan Presiden Donald Trump Terhadap Imigran Ilegal Di Perbatasan Amerika Serikat Dengan Meksiko. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56285>.
- Siswanto, S. (2018). Kepemimpinan Donald Trump dan Turbulensi Tatanan Dunia. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(1), 49–63. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i1.735>.
- Sutrisno, S., & Meirinaldi, M. (2020). Indonesia dan Rivalitas Amerika Serikat dengan China di Kawasan Asia Pasific. *Jurnal Ekonomi*, 22(3), 201–217. <https://doi.org/10.37721/je.v22i3.727>
- Yovana, K., & Adina, V. (2021). Kinerja Ekspor Udang Indonesia Ke Amerika Serikat Pasca Pemberlakuan Generalized System Of Preferences (Gsp) Tahun 2014—2019. *Moestopo Journal of International Relations*, 1(1), 57–69. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/mjir/article/view/1312>.
- Luar Negeri Amerika Serikat. *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(2), 193–209. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/2228>.